

**DETERMINASI KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris OPD Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Andre Nurdiantoro
NIM: 17.0102.0127

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**DETERMINASI KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris OPD Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Andre Nurdiantoro
NIM: 17.0102.0127

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

DETERMINASI KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Andre Nurdiantoro

NPM 17.0102.0127

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 Agustus 2018

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Barkah Susanto, S.E., M.Sc.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si.

Ketua

Barkah Susanto, S.E., M.Sc.

Sekretaris

Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

11 OCT 2018

Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andre Nurdiantoro
NIM : 17.0102.0127
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

DETERMINASI KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris OPD Kabupaten Wonosobo)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 16 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan



Andre Nurdiantoro

NIM. 17.0102.0127

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andre Nurdiantoro
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 04 Oktober 1990
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Kalipetung Rt 02 Rw 09 Kaliwiro Wonosobo
Alamat Email : andrenurdiantoro02@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar (1996-2002) : SDN 2 Kaliwiro
SMP (2004-2007) : Mts Negeri Kota Magelang
SMA (2007-2010) : Ma Negeri Kota Magelang
Perguruan Tinggi (2010-2018) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal :

-

Pengalaman Organisasi :

- HMA
- BEM
- LPM
- UKM OR

Magelang, 16 Agustus 2018

Peneliti



Andre Nurdiantoro

NPM. 17.0102.0127

MOTTO

Yang aku butuhkan disekelilingku adalah kepercayaan dan karakter, satu benda kesayangan hilang atau rusak adalah harga yang pantas aku bayar untuk mengetahui karakter seseorang.
(Han Fast n furious Tokyo drift)

Jujur adalah cara agar kita mendapat kepercayaan orang lain.
(Kholimah B Ali Arja)

I don't have friend but I've got family.
(Dominic Toretto)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**DETERMINASI KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris OPD Kabupaten Wonosobo)**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ketua Program Studi Akuntansi
4. Bapak Barkah Susanto, SE, M.Sc yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Keluarga tercinta terutama Ibu Kholimah B Ali Arja dan Bapak Aminu Nurodin yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan putra tercintanya.
7. Ibu Mulyanti, Bapak Budi, Bapak Haji M Irfan dan keluarga yang telah memberikan nasehat dan ilmu kehidupan yang tidak akan saya dapatkan di bangku pendidikan.
8. Para perangkat OPD Kabupaten Wonosobo atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 16 Agustus 2018

Peneliti



Andre Nurdiantoro
NIM. 17.0102.0127

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	15
A. Telaah Teori	15
1. Teori Segitiga Kecurangan	15
2. Teori Agensi	18
3. Kecurangan Akuntansi	19
4. Pengendalian Internal	23
5. Asimetri Informasi	25
6. Kesesuaian Kompensasi	27
7. Penegakan Hukum.....	32
8. Perilaku Tidak Etis	32
9. Ketaatan Aturan Akuntansi	33
B. Penelitian terdahulu	34
C. Perumusan Hipotesis.....	35
D. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III	43
METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	44
D. Alat Analisis Data	48
E. Pengujian hipotesis	51
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Statistik Deskriptif Responden.....	Error! Bookmark not defined.
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Uji Kualitas Data.....	Error! Bookmark not defined.

E. Analisis Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.
F. Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
G. Pembahasan Pengaruh	Error! Bookmark not defined.
BAB V	75
KESIMPULAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Keterbatasan Penelitian	76
C. Saran	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Profil Responden.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Pengujian Validitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 <i>Cross Loading</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 6 Pengujian Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 7 Hasil uji Analisis Linier Berganda.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 9 Uji F	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 10 Uji t	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	43
Gambar 3. 1 Penerimaan Uji F	52
Gambar 3. 2 Penerimaan Uji t	53
Gambar 3. 3 Penerimaan Hipotesis Negatif	53
Gambar 4. 1 Penerimaan Hipotesis Uji F	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Penerimaan Hipotesis Pengendalian Internal	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Penerimaan Hipotesis Asimetri Informasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 4 Penerimaan Hipotesis Kesesuaian kompensasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 Penerimaan Hipotesis Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 6 Penerimaan Hipotesis Perilaku tidak etis	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 7 Penerimaan Hipotesis Ketaatan Aturan Akuntansi	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Daftar Sampel dan Pengambilan OPD di Kabupaten Wonosobo	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Tabulasi Data Mentah.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Tabulasi data Valid.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Statistik Deskriptive	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6 Uji Validitas.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7 Cross Loading.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8 Uji Reliabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9 Hasil Regresi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10 Surat Penyebaran Kuesioner.....	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

DETERMINASI KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris OPD Kabupaten Wonosobo)

**Oleh:
Andre Nurdiantoro**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, perilaku tidak etis dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Sampel penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah dinas dan badan Kabupaten Wonosobo. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria kemudian dapat diolah dalam penelitian ini adalah 74 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepatuhan hukum dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

Kata kunci: *Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum, Perilaku Tidak Etis Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kecurangan sudah sering terjadi pada lembaga Swasta ataupun lembaga pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkualitas dan berkompeten. OPD merupakan instansi pada pemerintahan daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah yaitu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Dewi & Ratnadi, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengenai aktivitas keuangan di

pemerintahan daerah. Kecurangan akuntansi sebagai Salah saji yang timbul dari kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan yang berupa salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan pada laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan (IAI, 2001).

Dewi & Ratnadi (2017), Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya yaitu *stakeholders*. Laporan keuangan berisi tentang kondisi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan organisasi pemerintahan berisi tentang laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. ACFE (2000), mengkategorikan tiga kelompok skema kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembuat laporan keuangan yang berupa bentuk salah saji material. Kecurangan ini dapat bersifat finansial maupun non finansial. (Wilopo, 2006) kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang dapat menimbulkan transaksi negatif atau dengan sengaja menghapus penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan seperti penyalahgunaan atau penggelapan dengan tujuan menipu pemakai eksternal laporan keuangan. PSAK No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan revisi tahun 2009 Paragraf ke 24 menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang membuat informasi pada laporan keuangan

berguna bagi pemakai, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas, kecurangan non kas, persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya. Kecurangan adalah perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau kesatuan untuk menipu orang lain atau organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Penyalahgunaan aset dapat menimbulkan terjadinya *misrepresentation* (penyajian yang keliru) untuk merusak atau menahan data yang diperlukan sebagai bahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kecurangan aset dapat berupa penyalahgunaan aset organisasi seperti kendaraan, rumah, alat pendukung organisasi yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri (Fauwzi, 2011).

Kecurangan berkaitan dengan korupsi, tindakan korupsi yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan organisasi. UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan kelompok, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. UU No.254 Tahun 1960 korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Korupsi dapat berdampak pada kerugian keuangan suatu negara, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kriminalitas yang semakin naik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Fenomena yang terjadi

yaitu kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 dan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret pegawai dinas DPU-PR Kabupaten Wonosobo pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 (www.KPKnews.go.id). Kasus korupsi yang terjadi pada organisasi perangkat daerah menunjukkan bahwa tindakan korupsi membuat lemahnya kepercayaan publik kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara.

Wilopo (2006), Sistem monitoring mampu menurunkan tindak kecurangan yang terjadi, untuk mendapatkan hasil *monitoring* yang baik, maka diperlukan pengendalian internal. Pengendalian internal memegang peranan penting pada organisasi untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan (Fauwzi ,2011). Pengendalian internal dapat menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis serta tindakan untuk berlaku curang. BPK ungkap temuan 1.393 kasus kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ini terungkap pada ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2016 yang merugikan negara senilai 19,48 triliun Rupiah (www.BPK.go.id). Sistem pengendalian internal yang lemah akan menyebabkan kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak dapat di percaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional organisasi, serta tidak dapat di patuhinya kegiatan yang di tetapkan.

Adelin (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai

dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Pengendalian internal mempunyai fungsi untuk pengawasan, pengarahan, mengukur suatu sumberdaya pada organisasi, mencegah dan mendeteksi penggelapan, melindungi sumberdaya organisasi yang berwujud (mesin dan lahan), maupun yang tidak berwujud (reputasi, hak kekayaan intelektual, hak dagang). Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya, menyediakan informasi bagaimana menilai suatu kinerja dan menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak kecurangan yang lain yaitu asimetri informasi. Teori keagenan memprediksi jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal yang menunjukkan kepentingan kedua belah pihak berbeda, maka agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan principal (Gudono, 2012). Asimetri informasi dapat menimbulkan tindakan kekacauan moral (*moral hazard*) dan pilihan yang merugikan (*adverse selection*). Asimetri informasi adalah situasi ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak (*agent* dan *principals*) dan sebagai akibatnya konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut (Breda, 2002). Semakin tinggi asimetri informasi yang dimiliki oleh satu pihak maka semakin besar kesempatan pihak tersebut untuk

melakukan tindakan kecurangan, kecurangan tersebut bisa dilakukan dengan penghilangan dokumen, *mark up* harga maupun tindakan manipulasi laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan adalah sistem kompensasi, sistem kompensasi yang tepat mampu memotivasi anggota organisasi untuk berbuat baik. (Agarwal, 2001) kompensasi adalah imbalan yang diterima pegawai atas hasil kerja pada suatu organisasi. Kompensasi dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung, diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi. Pemberian kompensasi mampu memberikan motivasi, semangat, dan kepuasan organisasi perangkat daerah dalam bekerja, sehingga menimbulkan dorongan untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik daripada dengan minimnya kompensasi yang diberikan, kesesuaian kompensasi juga dapat meminimalkan tindakan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi, karena kesejahteraan diperhatikan dengan baik. Apabila nilai kompensasi yang diberikan lebih rendah daripada kebutuhan hidup layak maka dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang mengacu pada tindakan kecurangan, semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi.

Asshidiqie (2008), Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum. Kecurangan adalah bentuk tindakan melawan hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara. Penegakan hukum diharapkan mampu mengurangi tingkat kecurangan yang

terjadi dalam organisasi, penegakan hukum berfungsi sebagai dasar atau pedoman yang digunakan di berkehidupan bernegara dan bermasyarakat, hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normatif yang mengikat dan mengatur kehidupan, penegakan hukum menyangkut penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum berfungsi sebagai alat kontrol pada organisasi. Semakin tinggi penegakan hukum yang ada pada organisasi pemerintahan maka akan menimbulkan semakin rendah tingkat korupsi dan tindakan kecurangan yang terjadi. Penegakan hukum juga mampu mengurangi tindakan seseorang untuk tidak melakukan perilaku yang tidak etis.

Perilaku etis adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik, sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk (Ebert, 2006). Perilaku tidak etis berkaitan dengan etika dalam berorganisasi, perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, agama, hukum adat istiadat yang diterima secara umum yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan. Contoh perilaku yang tidak etis pada organisasi pemerintahan adalah tidak mengikuti peraturan yang berlaku, tindakan menyalah gunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, dan tindakan yang berhubungan dengan merugikan negara. BPK mengungkapkan sebanyak 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang merugikan negara sebesar Rp25,14 triliun (www.bpk.go.id).

Teori Fraud Triangle menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh atribut penyebab, maka tindakan seorang pemimpin atau orang yang diberi kewenangan atau kekuasaan dipengaruhi oleh atribut penyebab (Green, 1979). Korupsi juga disebabkan karena adanya 3 faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Hal yang lazim dilakukan pada tindakan korupsi adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

PP nomor 71 tahun 2010 menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintah. Pada entitas pemerintah khususnya yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan ditaati dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah. Ketaatan adalah suatu sikap patuh kepada aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan dan dituruti. PP RI No. 24 tahun 2005 menjelaskan tentang Standar akuntansi keuangan adalah aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan aset organisasi, dengan aturan yang telah ditentukan dalam SAP.

Ketepatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan yang dihasilkan efektif handal serta akurat informasinya, aturan akuntansi dapat menghindarkan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. BPK mengungkapkan permasalahan ketidak hematatan, ketidak efisienan dan ketidak efektifan senilai Rp 2,25 triliun (www.bpk.go.id). Laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusuri setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi maka semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi.

Beberapa penelitian tentang kecurangan akuntansi telah dilakukan sebelumnya namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian, Setiawan (2015), pengaruh efektifitas pengendalian internal, asimetri informasi dan keadilan organisasi terhadap kecurangan akuntansi penelitian ini menunjukkan hasil asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizky & Fitri, 2017) dan (Zainal, 2013) yang menyatakan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Masih belum konsistennya hasil penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh antara pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepatuhan hukum, perilaku tidak etis dan

ketaatan aturan akuntansi, terhadap kecurangan akuntansi studi empiris pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Rani, 2014), dengan menggunakan persamaan keseluruhan variabel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu **Pertama** penelitian ini menambahkan variabel ketaatan aturan akuntansi dengan alasan bahwa aturan akuntansi wajib dimiliki oleh suatu organisasi agar organisasi tersebut mempunyai dasar atau pedoman yang digunakan dalam menentukan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi. (Rahmawati, 2012) aturan akuntansi dibuat agar terdapat ketetapan yang harus digunakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu organisasi. **Kedua** penelitian ini menambahkan variabel penegakan hukum dengan alasan penegakan hukum diharapkan mampu mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi dalam organisasi, penegakan hukum berfungsi sebagai dasar atau pedoman yang digunakan di berkehidupan bernegara dan bermasyarakat, hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normative yang mengikat dan mengatur kehidupan, penegakan hukum menyangkut penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Asshidiqie, 2009). **Ketiga** penelitian ini menambahkan variabel perilaku tidak etis dengan alasan perilaku tidak etis merupakan perilaku menyimpang didalam bekerja, perilaku ini terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, dan perilaku tidak berbuat apa-apa (Robinson, 1995).

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
5. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
6. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti terhadap bukti empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.
- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi yang dapat dijadikan pembandingan bagi penelitian lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Khususnya dan Organisasi Perangkat Daerah lain umumnya, penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk menanggulangi kecurangan akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang terlibat dalam Pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

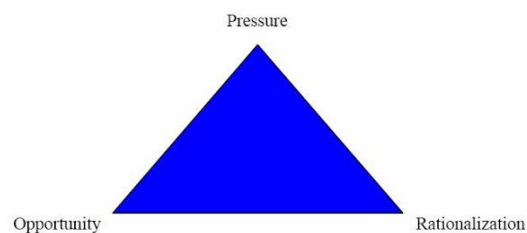
BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Cressey (1950) mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan / pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Teori ini juga megemukakan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, diungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Sebagaimana tergambar berikut ini:



a. *Pressure*

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, diantaranya keadaan dimana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, *Pressure* dapat meningkatkan kinerja, akan tetapi, di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya *fraud* dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan *pressure* adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah financial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

b. *Opportunity*

Opportunity adalah peluang / kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi

kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.

c. *Rationalization*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah *fraud* adalah rasionalisasi. Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencarialasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003) rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk pada proses di mana peningkatan jumlah tindakan sosial menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: (a) bahwa tindakannya untuk membahagiaka keluarga dan orang-orang yang

dicintainya, (b) masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain), (c) perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

2. Teori Agensi

Jensen and Mecling (1976), teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*, pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *pricipals* dalam kapasitasnya untuk mengambil keputusan. Munculnya masalah agensi disebabkan oleh konflik perbedaan kepentingan dan perbedaan informasi yang dimiliki antara pihak *principals* dan *agent*. *Agency Theory* atau teori keagenan menjelaskan tentang (kontrak) hubungan antara dua pihak yaitu *principal* (investor) dan agen (manajer). Teori mengenai hubungan keagenan ini digunakan dalam rangka untuk memahami *corporate governance* lebih dalam. Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).

- c. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut pemimpin sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna laporan keuangan karena dengan kondisi yang paling besar ketidak pastiannya, misalnya kurang dalam penguasaan informasi. Adanya ketidak seimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dapat membuat organisasi menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di organisasi.

3. Kecurangan Akuntansi

- a. Pengertian Kecurangan Akuntansi

Fauwzi (2011), kecurangan adalah perbuatan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri yang menyebabkan kerugian. Khususnya terjadi *misrepresentation* (penyajian yang keliru) untuk merusak atau dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. (IAI 2001), menjelaskan kecurangan akuntansi

sebagai Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang, uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Hardianto (2017), kecurangan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain, hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Penggelapan disini dimaksudkan adalah dengan mengubah kekayaan atau aset yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dapat merugikan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecurangan merupakan tindakan melawan hukum yang

bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau sekelompok individu yang berlibat merugikan organisasi.

b. Skema Kecurangan

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) adalah salah satu asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan. ACFE mengkategorikan skema kecurangan ke dalam tiga kelompok yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembuat laporan keuangan dalam bentuk salah saji material. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

- 1) Penyalahgunaan aset yang dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran pengeluaran biaya secara curang.
- 2) Kecurangan berkaitan dengan korupsi. Tindakan korupsi yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Pelaku Kecurangan

Adelin (2013), pelaku kecurangan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1) *First-time offenders*

Pelaku memiliki tekanan dalam hidupnya yang melewati batas penghasilannya atau pelaku merasionalisasi tindakannya bahwa merupakan hal biasa jika melakukan kecurangan.

2) *Repeat offenders*

Seseorang yang pernah melakukan kecurangan memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali, faktor kesempatan menjadi pemicu untuk melakukan kecurangan.

3) *Organized crime groups*

Kecurangan ini dilakukan kelompok juga secara individu, biasanya melakukan kecurangan dengan tipe khusus. Faktor utama kecurangan tipe ini karena adanya kesempatan, yaitu lemahnya pengendalian internal, penyuapan atau pemerasan oleh karyawan atau melalui kolusi dengan pemasok atau pelanggan.

4) *Internally committed for the perceived benefit of the corporation.*

Pelaku kecurangan biasanya pegawai yang percaya bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan adalah untuk kebaikan perusahaan. Secara khusus, tekanan dan rasionalisasi terhadap kesempatan kondisinya sama seperti tipe *first-time offender* maupun *repeat offender*.

d. Faktor Pendorong Kecurangan

Ema Kurniawati (2012), penyebab atau pemicu *Fraud* dibedakan atas tiga hal yaitu:

1) Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Motivasi melakukan kecurangan, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi), nilai (*values*), dan ada pula karena dorongan keserakahan.

2) Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah suatu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Biasanya hal ini dapat terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang.

3) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

4. Pengendalian Internal

a. Pengertian pengendalian internal

Adelin (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian

laporan keuangan. Mulyadi (2002), menyatakan bahwasanya pengendalian internal adalah sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan adanya pengendalian yang efektif, maka dapat dipastikan bahwa tingkat terjadinya kecurangan akuntansi dapat dikurangi. Hall (2009), Pengendalian internal merupakan berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 78 (SAS 78) pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang sesuai dengan rekomendasi *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, serta aktivitas pengendalian.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Arens (2009), menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal

yang efektif yaitu:

1) Akuntabilitas pelaporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Organisasi memikul tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi.

Pengendalian dalam organisasi akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Semua organisasi publik diharuskan mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

5. Asimetri Informasi

a. Pengertian Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi

muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal. Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen (Rahmawati, 2012). Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi dan biasanya dapat terjadi pada saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar.

b. Bentuk Asimetri Informasi

- 1) Asimetri informasi vertikal, yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (atasan). Setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik dengan meminta atau memberi informasi kepada atasan.
- 2) Asimetri informasi horizontal, yaitu informasi yang mengalir dari orang-orang dan jabatan yang sama tingkat otoritasnya atau informasi yang bergerak diantara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan ataupun bawahan antara satu dengan yang lainnya dan mereka menempati bidang fungsionalnya yang berbeda dalam organisasi namun dalam level yang sama.

c. Tipe Asimetri Informasi

Jansen dan Meckling (1976), ada dua tipe asimetri informasi yaitu:

1) *Adverse selection*

Adverse selection adalah sejenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangusungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* dapat terjadi karena salah satu pihak lebih mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan suatu organisasi.

2) *Moral hazard*

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak yang lainnya tidak.

6. Kesesuaian Kompensasi

a. Pengertian Kompensasi

Rivai (2010), mengemukakan bahwa Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan/organisasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja (Argawal,2001). Kompensasi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang yang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi daripada di organisasi yang lain (Martis and

Jackson, 2006). Kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi (Yahman, 2009). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan pada organisasi. Kompensasi harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi/perusahaan agar karyawan merasa dihargai.

b. Macam-macam Kompensasi

Rivai (2010), Kompensasi terbagi menjadi dua yaitu:

1) Kompensasi Finansial

Kompensasi finansial terdiri atas dua yaitu:

- a) Kompensasi langsung (gaji dan upah), pembayaran prestasi, pembayaran insentif, komisi, bonus, bagian keuntungan, opsi saham, dan pembayaran tertangguh yang meliputi tabungan hari tua, saham komulatif.
- b) Kompensasi tidak langsung (tunjangan) asuransi, pesangon, sekolah anak, dan pensiun. Kompensasi di luar jam kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, dan cuti hamil, sedangkan berdasarkan fasilitas meliputi rumah, biaya pindah, dan kendaraan.

2) Kompensasi Nonfinansial

Kompensasi non finansial meliputi jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompensasi

Rivai (2010), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Kompensasi terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengaruh lingkungan eksternal meliputi pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan serikat pekerja.
- 2) Pengaruh lingkungan internal meliputi anggaran tenaga kerja dan siapa yang membuat keputusan kompensasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dalam pemberian kompensasi:

- 1) Adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja datang dari pihak organisasi maka secara otomatis kompensasi relatif tinggi, sebaliknya apabila individu yang membutuhkan pekerjaan maka kompensasi relatif lebih rendah.

- 2) Kemampuan dan kesediaan organisasi membayar.

Besar atau kecilnya Kompensasi yang akan diberikan kepada pegawai akan sangat tergantung kepada kemampuan finansial yang dimiliki organisasi.

- 3) Serikat buruh dan organisasi pegawai

Keberadaan karyawan dalam perusahaan akan membuat karyawan membentuk suatu ikatan dalam rangka proteksi atas kesemena-menaan pimpinan, maka akan muncul rasa yang menyatakan bahwa perusahaan

tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa adanya pegawai. Hal ini dapat mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan organisasi.

4) Produktifitas dan prestasi pegawai

Kemampuan pegawai dalam menghasilkan prestasi kerja akan sangat mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima.

5) Biaya hidup/ *Living cost*

Tingkat biaya hidup disuatu daerah akan mempengaruhi besarnya kompensasi.

6) Posisi atau jabatan

Tingkat jabatan karyawan akan mempengaruhi besarnya kompensasi, selain itu berat ringannya bebas dan tanggung jawab suatu pekerjaan pun mempengaruhi kompensasi.

7) Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja

Semakin tinggi pendidikan karyawan dan semakin banyak pengalaman kerja, maka semakin tinggi kompensasinya.

8) Sektor pemerintah

Pemerintah sebagai pelindung agar karyawan mendapat kompensasi yang adil dan layak.

d. Tujuan Kompensasi

Tujuan kompensasi yaitu :

- 1) Untuk memberi daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja karena organisasi berkompetisi untuk mendapatkan pegawai yang diharapkan.

- 2) Mempertahankan pegawai yang ada pegawai dapat saja keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran pegawai yang semakin tinggi.
- 3) Menjamin keadilan, kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan di pasar kerja.
- 4) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Pemberian kompensasi adalah untuk membuat karyawan berperilaku seperti keinginan organisasi dimasa depan, seperti tanggung jawab, ketaatan, dan perilaku-perilaku lainnya.
- 5) Mengendalikan biaya
Sistem Kompensasi yang rasional membantu organisasi memperoleh dan mempertahankan para pegawai dengan biaya yang beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja diayar dibawah atau diatas standar.

7. Penegakan Hukum

Asshidiqie (2009), mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normatif yang mengikat dan mengatur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah kecurangan, sehingga penting hukum ditegakkan agar kecurangan dapat dihindari.

8. Perilaku Tidak Etis

Velasquez (2005), etika berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Ethos (tunggal) atau ta etha (jamak) yang berarti kebiasaan dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.
- b. Etika dalam pengertian kedua ini dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul

dalam masyarakat.

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya.

9. Ketaatan Aturan Akuntansi

Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi organisasi jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
1	Rani (2014)	Pengaruh efektivitas pengendalian intern, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan perilaku tidak etis, terhadap kecurangan Akuntansi.	Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi
2	Rizki dan Safitri (2017)	Pengaruh efektivitas pengendalian intern, asimetri informasi, penegakan hukum dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan Akuntansi.	Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi.
3	Downida (2017)	Pengaruh Keefektifa Pengendalian Internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi	Penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil
5	Toyibatun (2009)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi	Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Kesesuaian SPI dan sistem kompensasi yang berpengaruh negatif terhadap Kecurangan akuntansi.
6	Ryan dan Ridwan (2017)S	Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi	pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi.
	Lestari dan Supadmi (2017)	Pengaruh kesesuaian kompensasi, enerapan sistem informasi dan efektifitas pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.	Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi

Sumber: data penelitian terdahulu

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi

Adelin (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Mulyadi (2002), menyatakan bahwasanya pengendalian internal adalah sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan adanya pengendalian yang efektif, maka dapat dipastikan bahwa tingkat terjadinya kecurangan akuntansi dapat dikurangi.

Teori *fraud triangle* menjelaskan adanya dorongan dan peluang seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang. Secara singkat seorang pimpinan organisasi harus bisa memberikan keyakinan dan contoh kepada pegawai agar bertindak sesuai peraturan yang berlaku agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada dorongan dan peluang yang besar dalam suatu organisasi.

Pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi diharapkan dapat mengurangi penyebab terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Peluang yang besar membuat kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. (Zainal, 2013) dan (Rani,2014) menunjukan bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap Kecurangan akuntansi.

H1. Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi

2. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal. Menurut Rahmawati (2012), Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi dan biasanya dapat terjadi pada saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan.

Teori keagenan (Meckling, 1976) Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principals* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidak seimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang organisasi dibandingkan dengan *principals*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Pada organisasi pemerintahan pihak yang bertugas sebagai agen adalah OPD sedangkan yang sebagai principal adalah pemerintah pusat. (Zainal, 2013) menunjukkan bahwa Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap

Kecurangan akuntansi. (Setaiawan 2015), asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

H2. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi

3. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi

Rivai (2004), mengemukakan bahwa Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan/organisasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja (Argawal, 2001). Kompensasi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang yang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi daripada di organisasi yang lain (Martis and Jackson, 2006).

Berdasarkan teori *fraud triangle* menjelaskan adanya dorongan seseorang pegawai terhadap pemberian kompensasi yang tidak sesuai untuk melakukan kecurangan. Seseorang cenderung akan melakukan suatu hal untuk mendapatkan kompensasi yang lebih. Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap tindakan maupun perilaku seseorang di Organisasi. Seseorang cenderung berperilaku tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Pimpinan akan menjadi tolok ukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan. Kecurangan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut tidak

lain didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau pemerintah termasuk melakukan kecurangan akuntansi.

Kompensasi tersebut bertujuan agar pegawai dapat bertindak sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak melakukan tindakan menyimpang seperti adanya perilaku tidak etis. Tindakan menyimpang diharapkan dapat berkurang dengan adanya sistem kompensasi yang diberikan. Kompensasi yang sesuai menjadi bagian yang sangat penting bagi kinerja karyawan serta keberhasilan organisasi (Luthans, 1998). (Zainal, 2013) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan akuntansi.

H3. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi

4. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecurangan Akuntansi

Asshidiqie (2009) mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normatif yang mengikat dan mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau

yang disebut perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah kecurangan, sehingga penting hukum ditegakkan agar kecurangan dapat dihindari.

Teori *fraud triangle* menjelaskan adanya dorongan dan peluang seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang. Secara singkat seorang pimpinan organisasi harus bisa memberikan keyakinan dan contoh kepada pegawai agar bertindak sesuai peraturan yang berlaku agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada dorongan dan peluang yang besar dalam suatu organisasi. Hukum berfungsi sebagai pengendalian, dengan adanya penegakan hukum maka tindakan kecurangan akan berkurang, jika penegakan hukum tinggi maka kecurangan akan menurun. (Rizky & Fitri, 2017) menunjukkan bahwa hubungan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

H4. Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Akuntansi

5. Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi

Velasquez (2005) etika berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Ethos (tunggal) atau ta etha (jamak) yang berarti kebiasaan dan adat istiadat.

Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

- b. Etika pengertian kedua ini dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis, melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul di masyarakat.

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara organisasi berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya.

Teori *fraud triangle* menjelaskan adanya dorongan dan peluang seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang. Secara singkat seorang pimpinan organisasi harus bisa memberikan keyakinan dan contoh kepada pegawai agar bertindak sesuai norma-norma yang berlaku agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada dorongan, peluang dan rasionalisasi yang besar dalam suatu organisasi. Kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh atribut perilaku tidak etis orang yang terlibat didalamnya. Suatu perusahaan atau instansi perilaku tidak etis sangat berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi yang mungkin timbul di organisasi, semakin tinggi perilaku tidak etis semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang terjadi. (Adelin, 2013) menyatakan bahwa perilaku tidak etis signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H5. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi

6. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi

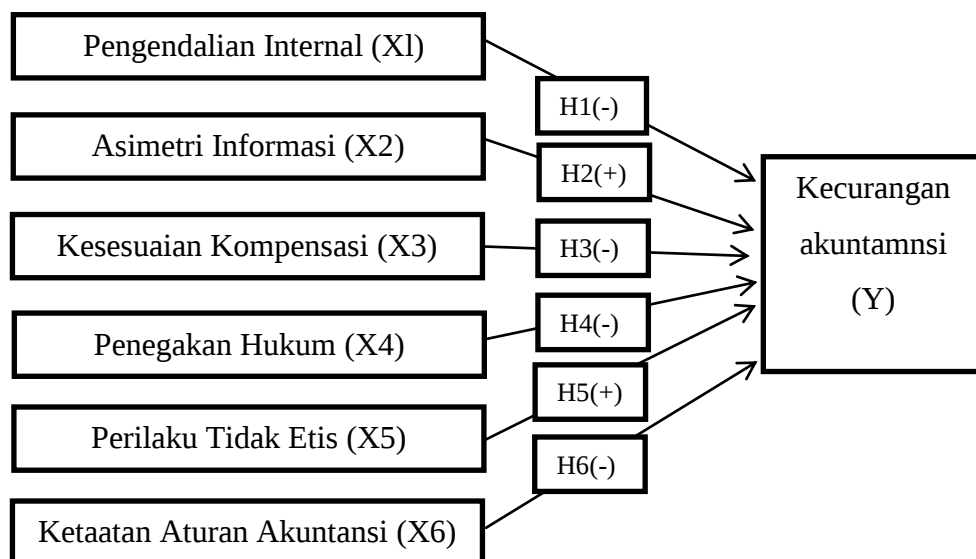
Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi pemakai laporan keuangan jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi, pada organisasi pemerintahan penggunaan standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman pembuatan dokumen yang berkaitan dengan akuntansi.

Teori *Fraud Triangle* Cressey (1953) menjelaskan ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud atau kecurangan, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Adanya tanggung jawab untuk mengoperasikan sebuah standar keuangan akuntansi pemerintah memberikan peluang atau kesempatan seseorang dalam berbuat curang. Penerapan Standar akuntansi dibuat untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh organisasi guna memudahkan pengelolaan keuangan organisasi, namun penerapan standar akuntansi tidak lepas dari adanya risiko keamanan dan salah saji yang dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Ketaatan terhadap aturan akuntansi akan mampu

mengurangi tindakan yang berorientasi kepada tindakan kecurangan. (Kolhberg, 1969) moralitas manajemen yang tinggi juga didukung pada ketaatan aturan yang berlaku. sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi. (Adelin, 2013) menyatakan bahwa Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H6. Ketaatan aturan akuntansi negatif terhadap kecurangan akuntansi

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari responden pada kantor OPD di Kabupaten Wonosobo dengan menyebar kuesioner kepada Kepala OPD, bendahara penerimaan atau pengeluaran, kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan pada OPD di Kabupaten Wonosobo.

B. Populasi dan Sampel

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai sifat sama, peneliti menggunakan metode *poorpositive sampling*, sample pada penelitian ini adalah kepala OPD selaku pengguna anggaran, kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan, bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan karena mereka memahami masalah akuntansi, selain itu pada umumnya mereka terlibat dengan kegiatan keuangan pada organisasi pemerintahan daerah dan Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Kecurangan Akuntansi

Kecurangan akuntansi adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan orang lain. Variabel ini diukur dengan 9 item pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Instrumen yang digunakan bersumber dari penelitian (Rizki dan Fitri, 2017) Instrumen tersebut antara lain:

- a) Kecurangan Laporan Keuangan
- b) Penyalahgunaan Aset
- c) Korupsi

2. Pengendalian internal

Adelin (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan 5 item pernyataan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh penelitian (Rizki dan Fitri, 2017) dan diukur menggunakan skala likert 1-5. Indikatornya yang digunakan yaitu:

- a) Lingkungan Pengendalian
- b) Penaksiran Resiko
- c) Aktivitas Pengendalian
- d) Inforamsi dan Komunikasi
- e) Pemantauan dan Monitoring

3. Asimetri Informasi

Asimetri informasi ini timbul karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* dan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan (Rahmawati, 2012). Asimetri informasi yang terjadi antara *principals* dan *agent* mendorong terjadinya informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Variabel ini diukur dengan menggunakan 6 item pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 yang dikembangkan dari penelitian (Komang, & Lestari, 2017).

- a) informasi laporan keuangan
- b) hubungan transaksi keuangan
- c) kerahasiaan informasi
- d) tanggung jawab informasi

4. Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi menurut (Rivai, Veithzal dan Sagala, 2010) merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan. Kesesuaian kompensasi dimaksudkan bahwa imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa yang diberikannya adalah sesuai dengan pengorbanannya, sehingga imbalan tersebut mampu memotivasi mereka untuk bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Variabel ini diukur dengan 5 item pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh (komang & lestari, 2017) dan diukur menggunakan skala likert 1-5. Indikatornya yang digunakan yaitu:

- a) Kompensasi finansial
- b) Kompensasi nonfinansial
- c) Mempertahankan karyawan yang ada
- d) Menjamin keadilan

5. Penegakan hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma - norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshidiqie, 2009). Variabel ini diukur dengan 4 item pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh penelitian (Rizki dan Fitri, 2017) dan diukur dengan skala linker 1-5 indikator yang digunakan adalah.

- a) Peraturan organisasi
- b) Disiplin kerja
- c) Pelaksanaan tugas
- d) Tanggung jawab

6. Perilaku Tidak Etis

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Ebert, 2006). Variabel ini diukur dengan 5 item pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh penelitian (Rizki dan Fitri, 2017) dan diukur menggunakan skala likert 1-

5. Indikatornya yang digunakan yaitu:

- a) Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan
- b) Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya Organisasi
- c) Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan
- d) Perilaku yang tidak berbuat apa apa
- e) Perilaku yang mengabaikan peraturan

7. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban bagi organisasi untuk mematuhi segala aturan akuntansi dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang berkualitas. Variabel ini diukur dengan 7 item pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh penelitian (Rizki dan Fitri, 2017) dan diukur menggunakan skala likert 1-5.

Indikatornya yang digunakan yaitu:

- a) Tanggung jawab penerapan
- b) Integritas
- c) Objektivitas
- d) Kehati-hatian
- e) Kerahasiaan
- f) Konsistensi
- g) Standar teknis

D. Alat Analisis Data

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2016: 19). Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewnes* (kemencengan distribusi). Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ghozali (2016: 52), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam menguji validitas instrumen kuisisioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). CFA merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah

dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruknya atau tidak.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi orthogonal dapat berbentuk *quartimax*, *varimax*, *equimax* dan *promax*.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *bartlett of sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *bartlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *kaiser meyer olkin measure of sampling adequacy* (KMO NSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor.

b. Uji Reliabilitas

Ghozali (2016: 52), Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70.

3. Uji Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, perilaku tidak etis dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Adapun model persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KA = \alpha - \beta_1PI + \beta_2AI - \beta_3KK - \beta_4PH - \beta_6PTE + \beta_5KAA + e$$

Keterangan:

KA	= Kecurangan Akuntansi
β_1, β_2	= Koefisien Regresi dari X
PI	= Efektifitas Pengendalian Internal
AI	= Asimetri Informasi
KK	= Kesesuaian Kompensasi
PH	= Penegakan Hukum
PTE	= Perilaku tidak Etis
KAA	= Ketaatan Aturan Akuntansi

E. Pengujian hipotesis

1. Uji R^2 (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

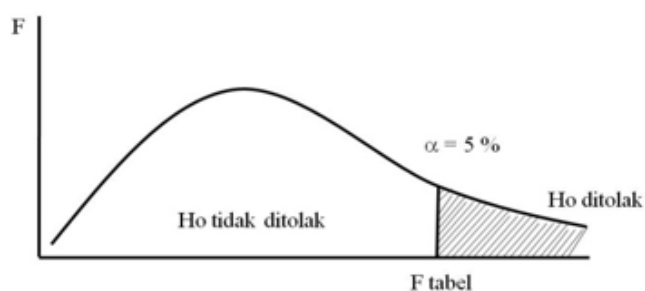
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2016:95). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model.

2. Uji f (goodness of fit test)

Uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji f menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2016:97). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut $(df) = n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- a) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- b) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.



Gambar 3. 1 Penerimaan Uji F

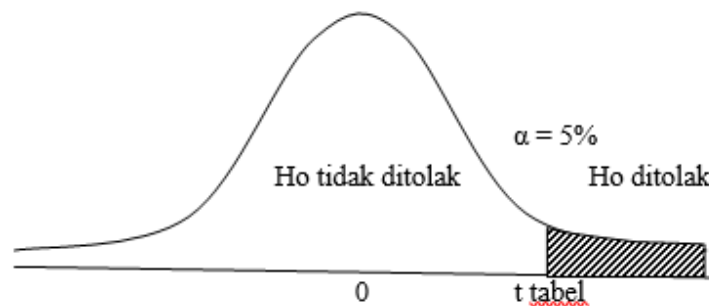
3. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2016:97)

a) Hipotesis Positif

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

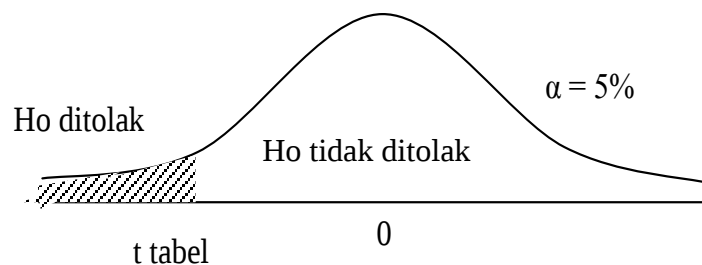
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2 Penerimaan Hipotesis positif

b) Hipotesis Negatif

- a) H_0 ditolak jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) H_0 diterima jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 3 Penerimaan Hipotesis Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, perilaku tidak etis, ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Sampel yang diambil yaitu OPD Kabupaten Wonosobo sebanyak 16 dinas dan 3 badan, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 74 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, perilaku tidak etis, ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi sebesar 29,3% sedangkan sisanya 70,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.
3. Hasil uji T menunjukkan bahwa pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Wonosobo hal tersebut dikarenakan OPD di Kabupaten Wonosobo belum maksimal dalam menerapkan peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi seperti

kas dan persediaan. Kecurangan akuntansi tidak dipengaruhi oleh transparansi dalam penyediaan informasi kepada publik, mengenai kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai tentang kondisi keuangan organisasi perangkat daerah.

4. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Hasil pengujian menunjukkan perilaku tidak etis sangat berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi yang mungkin timbul pada organisasi, kecurangan akuntansi tinggi akibat dari perilaku tidak etis pada individu yang terlibat didalamnya. Dari hasil pengujian diatas dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi perilaku tidak etis semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang terjadi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di Dinas dan Badan sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh kabupaten lain.
2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebar. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Serta hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari kuesioner.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, perilaku tidak etis, ketaatan aturan akuntansi. Sedangkan

masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

C. Saran

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan Kecamatan agar lebih mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi
3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kecurangan akuntansi seperti Integritas dan Komitmen Organisasi.

Daftar Pustaka

- American Institute of Certified Public Accountant dan Association of Certified Fraud Examiners. 2009. *Managing The Business Risk of Fraud: A Practical Guide*.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Marks S. Beasley. 2009. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Adelin, V. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang, (September).
- Agarwal, S. and K. R. T. (2001). "Perceived Value: Mediating Role of Perceived Risk,." *Journal of Marketing Theory and Practice*, 9, 1–14.
- Asshidiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPK. (2016). Siaran pers badan pemeriksa keuangan, 57854096.
- Breda, H. dan Van. (2002). *Teori Akunting*. Tangerang: Iinteraksara.
- Dewi, K., & Ratnadi, N. (2017). Pengaruh pengendalian Internal dan Integrasi pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 917–941.
- Ebert, R. J. . R. W. G. (2006). "*Bisnis*", *Alih Bahasa Rd. Soemarnagara*. Jakarta: Erlangga.
- Fauwzi, M.G, 2011. (n.d.). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal , Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.
- Harry Krishna Mulia, M., Febrianto, R., & Kartika, R. (2017). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 198–208. <https://doi.org/10.18196/jai.180283>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik*. SA Seksi 319.

Pertimbangan Atas Pengendalian Intern Dalam Audit Laporan Keuangan.

Komang, N & Lestari, L. (2017). Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia.

Kolhberg, L. (1969). "Continuities and Discontinuities in Childhood and Adult Moral Development." *Human Development*, 12((2)), 93–120.

Kurniawati, Ema. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financial Statement Fraud* dalam Perspektif *Fraud Triangle*. *Skripsi*: Universitas Diponegoro.

Kusumastuti, Nur Ratri. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi* Sarjana pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Kpk News.go.id

Luthans, F. (1998). *Organisasi Behavior* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Intemasional Book Company.

Martoyo, S. (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.

Meckling, J. dan. (1976). The Theory oh Te Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Conomic*, 3, 305–360.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

PP nomer 71 tahun (2010).

PP RI No. 24 tahun 2005.

PSAK No.01.

Rahmawati. (2012). *Teori Akutansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rivai, Veithzal dan Sagala, E. J. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, Dan Perilaku Tidak Etis

Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 10–20. <https://doi.org/E-ISSN 2581-1002>

Robinson, T. (1995). *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. (K. Padmawinata, Ed.). Bandung: ITB.

Setiawan, M. D., Adi, I. M., Adiputra, P., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern , Asimetri Informasi , Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

UU No.254 Tahun 1960.

UU No. 20 Tahun 2001.

Velasquez, M. G. (2005). *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*. (Ana Purwanindan Totok Budi Santoso, Ed.) (5th ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wilopo. (2006). *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi pada perusahaan publik dan perusahaan badan usaha milik negara. SNA IX*. Padang.

Zainal, R. (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, asimetri informasi Dan kesesuaian kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Universitas Negeri Padang*, 1–25.